



KR-Zaini Arrosyid

Deklarasi Anti Bullying di SMPN 2 Selopampang.

Siswa SMPN 2 Selopampang Deklarasi Anti Bullying

TEMANGGUNG (KR) - Mencegah bullying dan kekerasan di sekolah, SMP Negeri 2 Selopampang melaksanakan deklarasi anti Bullying dan Kekerasan di sekolah, Jumat (15/11). Deklarasi ini diikuti seluruh siswa, guru karyawan, Polsek dan Koramil Selopampang, dengan jumlah peserta 376 peserta.

Deklarasi dimulai dengan berdoa bersama, kemudian sosialisasi anti Bullying, kekerasan dan narkoba. Kemudian pengucapan dan penandatanganan deklarasi oleh semua peserta dan ditutup dengan senam dan sarapan sehat bersama.

Kepala SMP Negeri 2 Selopampang, Sumiastuti SPd MM mengatakan tujuan deklarasi untuk mewujudkan sekolah yang bersinar, yaitu sekolah yang bersih dari bullying kekerasan dan Narkoba. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi seluruh siswa untuk belajar.

Waka Polsek Tembarak Iptu Yatno mengatakan bullying, kekerasan dan narkoba dikalangan pelajar akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia. Sekolah harus membentengi diri dengan iman dan disiplin yang kuat," kata dia.

Babinsa tempat, Sertu Irfan Silanda mengatakan tugas utama anak-anak adalah belajar sungguh-sungguh untuk menyongsong masa depan yang gemilang. "Hindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, karena masa depan masih panjang. Jangan sampai memiliki catatan kriminal karena akan merugikan masa depan kalian sendiri," kata dia. (Osy)-f

LOGISTIK PEMUNGUTAN SUARA

Temanggung Capai 98 Persen

TEMANGGUNG (KR) - Sebanyak 93 persen logistik untuk Pilkada 2024 telah diterima KPU Kabupaten Temanggung. KPU setempat terus berkoordinasi dengan rekanan dan KPU Jateng untuk kepastian kedatangan logistik. Ketua KPU Kabupaten Temanggung Hanry Sofyan Rois mengatakan logistik sebagian besar telah sampai dan beberapa yang belum semacam salinan daftar pemilih tetap dan daftar hadir.

"Tetapi kalau untuk bilik suara, surat suara, kotak, alas pencoblosan beserta alat coblos sudah datang semua, kira-kira dua hari lagi sudah datang semua formulir tersebut termasuk undangan," katanya.

Dia mengatakan saat ini sedang melakukan pengecekan logistik, misalnya untuk surat suara yang sudah diikat per 20 lembar dengan karet, sekarang sedang dihitung kembali, siapa tahu ada yang lebih atau ada yang kurang.

Menurut dia setelah pengecekan, kemudian dilakukan pengesetan di dalam plastik. Dimasukkan semua ke dalam plastik baru nanti dimasukkan ke dalam kotak suara. "Sekitar dua hari lagi dilakukan pengepakan. Ada sekitar 30-50 orang personel untuk melakukan pengecekan dan pengepakan, dan nanti 22 November 2024 kami sudah melakukan distribusi dari KPU ke PPK," katanya. (Osy)-f

PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

Sukoharjo Ranging 2 Nasional



KR-Dok Pembak Sukoharjo

Plt Bupati Sukoharjo Agus Santosa menerima penghargaan Penganugerahan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Tahun 2024.

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo menerima penghargaan Penganugerahan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI tahun 2024. Prestasi yang diraih yakni menduduki ranging 2 nasional. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Agus Santosa, Jumat (15/11) mengatakan, penghargaan sudah diserahkan pada Kamis (14/11/2024) di Hotel Le Meridien Jakarta.

Kabupaten Sukoharjo menduduki peringkat 2 tertinggi pada kategori Kabupaten dengan capaian nilai 99.36 Zona Hijau Opini Kualitas Tertinggi (A). Perolehan nilai tersebut naik secara signifikan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 Kabupaten Sukoharjo memperoleh nilai 90.19, dan tahun 2023 memperoleh nilai 97.42.

Capaian ini adalah buah dari komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan yaitu Bupati Sukoharjo, seluruh Perangkat Daerah yang dijadikan lokus penilaian yaitu Dinas Perekonomian dan Pencatatan Sipil, Dinas PM dan PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Puskesmas Kartasura, Puskesmas Sukoharjo dan Bagian Organisasi Setda Kab. Sukoharjo untuk menyelenggarakan dan menghadirkan pelayanan publik yang prima dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Ombudsman RI, Mokhammad Najih S.H MHum PhD berpesan agar seluruh penyelenggara layanan terus mempertahankan dan meningkatkan standar kepatuhan pelayanan publik. Menurutnya, apresiasi ini bukan sekedar pengakuan atas kinerja yang telah dicapai tetapi juga sebagai motivasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan dan terhindar dari maladministrasi. (Mam)-f

Jokowi Hadiri Kampanye Luthfi-Yasin

PURWOKERTO (KR) - Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (16/11) menghadiri kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Luthfi-Yasin) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Kehadiran Jokowi menjadi magnet ribuan warga menunjukkan dukungan terhadap pasangan yang diusung koalisi besar dari berbagai partai politik.

Dalam kegiatan tersebut, Jokowi bersama pasangan Luthfi-Yasin mengikuti kirab dari hotel tempat menginap menuju lokasi acara di halaman Hetero Space di Jalan Jenderal Gatot Subroto Purwokerto menggunakan mobil jip. Sepanjang perjalanan, Jokowi membagikan kaos kepada masyarakat yang antusias menyambungnya. Ia juga sesekali menunjuk pasangan Luthfi-Yasin yang berada di belakangnya, seolah mengajak



KR-Driyanto

Joko Widodo bersama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin menyapa warga Banyumas.

masyarakat mendukung pasangan tersebut.

Namun, Jokowi meninggalkan acara lebih awal untuk melanjutkan agenda lainnya. Saat ditemui wartawan, Jokowi menyatakan bahwa dirinya hadir atas un-

dangan tim kampanye Luthfi-Yasin. "Saya diundang, saya datang, dan melihat antusiasme masyarakat yang sangat luar biasa," ujar Jokowi.

Ketika ditanya alasan mendukung pasangan Luthfi-Yasin,

Jokowi enggan menjelaskan secara detail. "Semua orang tahulah, tidak perlu saya ceritakan. Yang penting, pemimpin, baik nasional maupun daerah, harus memiliki visi yang jelas untuk rakyatnya," tambahnya.

Dalam Pilkada Jawa Tengah, pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin didukung oleh koalisi besar, yakni Partai Gerindra, PKB, Golkar, PPP, NasDem, PKS, PAN, Demokrat, dan PSI. Total suara sah partai-partai tersebut dalam Pemilu Legislatif 2024 mencapai 13,7 juta suara. Sementara itu, pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, diusung oleh PDI Perjuangan, mengantongi total suara sah sebanyak 5,2 juta suara.

Menanggapi persaingan ini, Jokowi menyatakan bahwa hasil akhir ada di tangan rakyat. "Kedaulatan di tangan rakyat. Mereka yang akan menentukan," tegasnya. (Dri)-f

PEMENUHAN HAK KARYAWAN DIPANTAU

2.500 Karyawan Sritex Dirumahkan

SUKOHARJO (KR) - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) dan Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo memantau kondisi perkembangan karyawan atau buruh PT Sritex yang terkena status dirumahkan. Pemantauan dilakukan mengingat jumlahnya sangat banyak mencapai 2.500 orang. Hak karyawan menjadi sorotan utama pemantauan seperti gaji dan lainnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo Sumarno, Sabtu (16/11) mengatakan, sudah ada informasi resmi dari PT Sritex yang menyatakan sudah mengeluarkan kebijakan sebanyak 2.500 karyawan dirumahkan. Hal ini terkait dengan kondisi perusahaan dimana sebelumnya sudah diputuskan PT Sritex pailit

oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Dampaknya pihak perusahaan mengalami masalah bahan baku yang usianya tinggal tiga pekan.

Menurut Sumarno, para karyawan atau buruh yang dirumahkan tetap harus mendapatkan hak seperti gaji. Hal ini didasari status 2.500 orang tersebut masih karyawan atau buruh PT Sritex.

"Status 2.500 karyawan PT Sritex ini dirumahkan dan mereka berhak menerima hak seperti gaji selama dirumahkan," tandasnya.

Sementara itu PT Sritex mengakui sudah merumahkan 2.500 karyawan setelah pihak perusahaan diputus oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pailit. Selain itu masalah lain muncul karena

kendala bahan baku produksi tinggal selama tiga pekan. Kepastian tersebut diketahui setelah dicek langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Republik Indonesia Immanuel Ebenezer Gerungan yang mendatangi PT Sritex, Jumat (15/11).

Wamenaker mengatakan kunjungannya ke PT Sritex merupakan kegiatan yang kedua setelah pertama pada 28 Oktober 2024 lalu. Dalam dua kali kunjungan tersebut, ia bertemu langsung pihak manajemen dan karyawan PT Sritex.

Kunjungan kedua ini se-

ngaja dilakukan untuk memastikan sebanyak 50.000 karyawan PT Sritex tidak terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal itu dipastikan setelah melihat perkembangan hasil putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang menyatakan PT Sritex pailit.

"Dua pekan setelah kunjungan pertama, ternyata muncul kabar 2.500 karyawan PT Sritex dirumahkan karena usia hahah baku di PT Sritex sisa tiga pekan. Kunjungan kedua saya ini untuk memastikan tidak ada PHK di PT Sritex," jelas Immanuel Ebenezer. (Mam)-f

KERJA SAMA PT ERELA, RSUP SARDJITO DAN UGM

Operasi Katarak Gratis di Tawangmangu

KARANGANYAR (KR) - PT Erela bersama RSUP Dr Sardjito serta Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan bakti sosial operasi katarak gratis di UPF Pelayanan Kesehatan Tradisional RSUP Dr Sardjito di Tawangmangu, Jumat (15/11). Selain melayani operasi katarak gratis, dalam bakti sosial juga dibagikan kaca mata secara cuma-cuma kepada pasien dan masyarakat yang membutuhkan.

Operasi dilaksanakan di klinik pratama UPF oleh 10 dokter dan petugas medis RSUP Dr Sardjito. Usai skrining yang telah dilaksanakan pada 1-14 November, didapati 26 pasien dijadwalkan menjalani operasi katarak dan enam lainnya operasi penyakit mata pterygium. Sedangkan 140 lainnya hanya

perlu mengenakan alat bantu melihat alias kaca mata karena keterbatasan penglihatan.

Direktur PT Erela, Andreas Harjanto Hardjo mengatakan semua manusia berhak menikmati anugerah penglihatan. Hanya saja, tak semuanya memiliki kesempatan itu. Sebagian mengalami penurunan kualitas indera tersebut karena berbagai sebab. Bahkan di usia terhitung masih muda. Melalui bakti sosial perusahaan yang bergerak di farmasi ini, PT Erela ingin membantu mereka yang membutuhkan operasi namun terhalang kondisi ekonomi.

"Operasi katarak di Tawangmangu merupakan lokasi ke-26 baksos serupa dilaksanakan PT ERELA pada tahun ini. Baksos ini dimulai sejak



KR-Abdul Alim

Pelaksanaan operasi katarak di baksos PT Erela bersama stakeholder.

dua tahun lalu. Kami melakukan bakti sosial dari permintaan masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Operasi ini tanpa dipungut biaya. Namun bukan berarti asal-asalan. Kami mengundang dokter spesialis RSUP Dr Sardjito dengan metode mutakhir serta

tingkat keberhasilan tinggi," jelas Andreas.

Dijelaskan, penderita katarak maupun penyakit mata lainnya tidak hanya dialami kaum lansia. Pascapandemi, anak-anak juga terdampak pada penglihatannya karena terlalu banyak terpapar cahaya layar ponsel.

Dengan kondisi mata sehat, diyanini mendukung produktivitas pekerjaan dan aktivitas lainnya.

Kepala UPF Yankestrad RSUP Dr Sardjito, Dokter Ulfatun Nisa MBIomed mengapresiasi kerja sama eksternal dalam membantu masyarakat Tawangmangu mengakses hidup lebih berkualitas, terutama bagi penderita gangguan penglihatan. "Bakti sosial ini sengaja digelar untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional dan Hari Mata Sedunia," jelasnya.

Menurutnya, ini bagian dan upaya RSUP Sardjito dalam pelayanan kesehatan komprehensif dan akses kesehatan lebih baik. Sinergi antara pengobatan konvensional dan tradisional agar memiliki dampak positif lebih luas. (Lim)-f

KOMISI III DPRD INSPEKSI MENDADAK

Jembatan Butuh Terancam Putus Kontrak

SRAGEN (KR) - eenam anggota Komisi III DPRD Sragen melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Jembatan Butuh yang melintang di atas Sungai Bengawan Solo di Dukuh Butuh Desa Gedongan Kecamatan Plupuh, Sabtu (16/11). Jembatan senilai Rp 14,47 miliar itu sempat melengkung nyaris roboh dihantam banjir beberapa waktu lalu.

Sisa waktu pekerjaan yang tinggal 1,5 bulan dikhawatirkan tidak mencukupi untuk merampungkan proyek dan terancam putus kontrak. Sidak dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Sragen, Joko Supriyanto yang terjun melihat langsung Jembatan Butuh dari sisi tepi wilayah Dukuh Butuh. Kedatangan mereka disambut pelaksana proyek dan konsultan serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen.

Saat sidak, para legislator mencari direksi pelaksana pekerjaan, Sri Budi Joko Prasetyo selaku Direktur Pelaksana CV Kurnia Jaya. Legislator dari Partai Nasdem, Bambang Widjo Purwanto, mempertanyakan alamat rekanan CV Kurnia Jaya tercatat di Blora tetapi pelaksanaannya ternyata orang Sragen. Sri Budi Joko Prasetyo mengakui bila nama CV-nya me-

mang dari Blora tetapi pelaksana orang Sragen.

Legislator dari Partai Golkar Sragen, Muh Haris Effendi juga mempertegas pelaksana proyek bahwa erection atau proses perakitan komponen-komponen baja menjadi kerangka jembatan menelan dana Rp1,9 miliar. Dia juga mempertanyakan tentang alasan konstruksi yang menggunakan perancang

dari besi yang bercampur dengan kayu dan bambu.

Dia juga mempertanyakan mesin yang dipakai untuk menarik komponen baja rangka jembatan tetapi mesin yang dimaksud tidak ada. "Harusnya menggunakan bandung ke belakang untuk menahan rangka baja yang sebesar itu, sehingga tidak usah pakai perancang. Ternyata pihak kontraktor masih menggunakan sistem perancah. Dari sisi teknis saja sudah tidak benar. Metode pelaksanaannya tidak sesuai. Hal itulah yang membuat komponen baja rangka menjadi melengkung," ungkap Haris.

Haris mengaku mendengar struktur bangunan yang mengalami deformasi itu sudah menelan biaya sampai Rp 10 miliar. Dia menyampaikan pekerjaannya sebenarnya tinggal erection senilai Rp 1,9 miliar, cor lantai jembatan,

aspal, dan oprit. Kalau melihat kondisi proyek jembatan tersebut, Haris pesimis pekerjaan jembatan bisa selesai tepat waktu. "Baja yang rusak itu harus diganti semua. Termasuk baut-baut yang sudah dipakai diganti semua karena tidak bisa dipa-apakan. Katanya dari DPU sudah menghubungi pabrik dan siap mengganti yang baru," jelasnya.

Haris menyatakan waktu tinggal satu setengah bulan ke depan. Ketika terbentuk dengan mekanisme anggaran, Haris meyakini pekerjaan ini terancam putus kontrak karena pekerjaan tidak selesai. Dia menjelaskan anggaran Rp 14,47 miliar itu hanya untuk bangunan pilar bawah, erection, cor beton lantai, aspal, dan oprit. Seluruh komponen baja jembatan itu, jelas dia, bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). (Sam)-f



KR-Said Masykuri

Legislator Komisi III DPRD Sragen saat sidak di proyek Jembatan Butuh.